

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP STATUS HUKUM
PERKAWINAN JANDA CERAI TALAK DI LUAR SIDANG
PENGADILAN AGAMA
(Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)**

SKRIPSI

**Oleh:
Maulidia Rahmania
NIM 08210009**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan.

penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN HAKIM TERHADAP STATUS HUKUM PERKAWINAN JANDA CERAI TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 September 2012
Penulis,

Maulidia Rahmania
NIM 08210009

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Maulidia Rahmania, NIM 08210009, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP STATUS HUKUM PERKAWINAN
JANDA CERAI TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA
(Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 27 September 2012

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah,

Dosen Pembimbing,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001

Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Maulidia Rahmania, NIM 08210009, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP STATUS HUKUM PERKAWINAN
JANDA CERAI TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA
(Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*).

Dewan Penguji:

1. Dr. Fakhruddin, M.H.I. _____
NIP 197408192000031002 _____
Ketua Penguji

2. Erfaniah Zuhriah, M.H. _____
NIP.197301181998032004 _____
Sekertaris Penguji

3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. _____
NIP 197108261998032002 _____
Penguji Utama

Malang, 27 September 2012
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُعْنِي اللَّهُ كُلُّا مِنْ سَعْيِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”¹

¹ Q.S An-Nisaa (4): 130

PERSEMBAHAN

Dengan diiringi Puji Syukur dan Shalawat Nabi

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Abah Drs, H. M. Sanusi dan Umik Hj, Anis Zubaidah

Suamiku tercinta Ali Asyhar Ar-Rahbini, Bsc.

Putriku tersayang Magda Elena Syaheerah

yang telah menemani perjuangan dengan memberi

motivasi, doa dan kasih sayang

semoga selalu mendapat perlindungan dan kasih sayang

Yang Maha Rahiim

Untuk guru-guru, ustaz/ustadzahku, para dosen fakultas Syari'ah

yang mendedikasikan diri untuk mendidikku memahami

setitik dari ilmu-ilmu Allah

Segenap sahabat Ashabul Qohwa 08

yang telah membantuku dan memberikan dukungan dari awal hingga akhir

di UIN Malang

aku akan selalu rindukan kalian...

Obama yang cantik, Mas Ghofur, Mas Rama, Emak Rinda

semoga kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang dilindungi Nya

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul **PANDANGAN HAKIM TERHADAP STATUS HUKUM PERKAWINAN JANDA CERAI TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)**. Dengan segala daya, upaya serta bantuan, bimbingan baik arahan maupun instruksi dan beberapa hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Drs. Muhammad Nur Yasin, M.Ag., selaku dosen wali penulis. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Erfaniah Zuhriah, M.H., selaku dosen pembimbing. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.

7. Drs. A. Dardiri yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan selama penelitian di Pengadilan Agama Pasuruan.
8. Ali Asyhar Ar-Rahbini, Bsc., yang telah mendukung, memotivasi, membantu, menghargai dan atas kesabarannya selama penulisan skripsi ini.
9. Segenap teman-teman *Ashabul Qohwah* 08, terima kasih atas semua hal yang kalian berikan selama ini.
10. Segenap pihak-pihak yang membantu menyelesaikan penulisan dan penelitian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari penuh bahwa penyelesaian tugas akhir ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan pengalaman penulis. Untuk itu penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 27 September 2012
Penulis,

Maulidia Rahmania
NIM 08210009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/Ak-X/SI/VI/2007
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399, Faksmili 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Maulidia Rahmania
NIM : 08210009
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, MH
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Terhadap Status Hukum Perkawinan
Janda Cerai Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama
(Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	12 Desember 2011	Acc Proposal Skripsi	
2	4 Januari 2012	Revisi Proposal Skripsi	
3	24 Januari 2012	Konsultasi Bab I dan II	
4	3 September 2012	Konsultasi Bab III	
5	4 September 2013	Konsultasi Bab IV dan V	
6	5 Septembar 2012	Revisi Bab I-IV	
7	6 September 2012	Revisi Abstrak	
8	7 September 2012	Acc Skripsi	

Malang, 27 September 2012
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 1973060319990310001

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari Bahasa Arab kedalam tulisan Bahasa Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ' (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = M
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: ﴿فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ﴾ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadhd jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
BUKTI KONSULTASI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Sistematika Pembahasan	11

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan	12
1. Perkawinan dalam Fiqih	12
2. Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	22
B. Tinjauan Umum Mengenai Putusnya Perkawinan	25
1. Putusnya Perkawinan Dalam Fiqih	25
2. Putusnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	37
C. Tinjauan Umum Mengenai Metode Ijtihad Hakim	45
1. Metode Ijtihad Hakim	45
2. Metode Penemuan Hukum	53
D. Tinjauan Umum Mengenai Asal Usul Anak	57
1. Status Hukum Keperdataan Anak	57
2. Permohonan Asal Usul Anak	59
3. Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama	62

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	68
B. Jenis Penelitian	68
C. Pendekatan Penelitian	69
D. Sumber Data	70
E. Teknik Pengumpulan Data	71
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	73

BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Pasuruan	75
1. Sejarah, Letak Geografis dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan	75
2. Gambaran Perkara di Pengadilan Agama Pasuruan.....	78
B. Paparan dan Analisis Data Penelitian	84
1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor:1005/Pdt.G/2011/PA.Pasuruan	85
2. Pandangan Hakim Mengenai Status Hukum Perkawinan Kedua Janda Cerai Talak diluar Pengadilan Agama	88
3. Pandangan Hakim Mengenai Status Hukum Anak dari Perkawinan kedua janda Cerai Talak diluar Pengadilan Agama.....	101

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran	110

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

ABSTRAK

Rahmania, Maulidia. 08210009. 2012. *Pandangan Hakim Terhadap Status Hukum Perkawinan Janda Cerai Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)*. Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erfaniah Zuhriah, M.H.

Kata Kunci: Status Hukum, Perkawinan, Cerai

Perkawinan adalah ikatan suci antara pasangan suami istri, perkawinan bisa dikatakan sah jika syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Namun jika perkawinan telah dilaksanakan sedangkan istri adalah seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suami pertamanya tetapi tidak melalui persidangan pengadilan maka hukum pernikahannya masih belum memiliki kepastian hukum, karena status hukum sah atau tidaknya talak suami pertama masih memiliki dualism hukum, menurut agama sah namun jika mengingat pasal 39 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 UU No. 9/1989 tentang Peradilan Agama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode ijтиhad yang digunakan hakim dalam memutus perkara gugat cerai istri yang telah ditalak suami di luar sidang pengadilan agama, untuk mendeskripsikan pandangan hakim terhadap status hukum perkawinan kedua janda cerai talak diluar pengadilan dan untuk mengetahui status hukum anak dari perkawinan kedua janda cerai talak di luar pengadilan.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan bantuan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa hasil wawancara dengan informan, yaitu hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan sumber data sekunder berupa perundang-undangan, buku-buku, jurnal tentang perkawinan dan perceraian, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedang teknik pengolahan data dengan pemeriksaanulang (*editing*), pengelompokan data (*classifying*), konfirmasi (*Verifying*), analisis data (*Analyzing*) dan penarikan kesimpulan (*Concluding*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ijтиhad yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai istri yang telah ditalak suami di luar sidang pengadilan agama adalah metode maslahah mursalah. Mengenai status hukum perkawinan kedua penggugat, hakim menyatakan kalau pernikahannya tidak sah karena perceraian yang dengan suami yang pertama dilaksanakan di luar pengadilan dan perceraianya tidak sah, maka pernikahan yang kedua juga tidak sah (tidak memiliki kekuatan hukum) dan masalah anak penggugat dengan suami yang kedua, ada dua pendapat yakni, (a) nasab anak ikut pada nasab ibu dan dapat mendapatkan akta kelahiran dari catatan sipil (b) nasab anak dapat ikut pada nasab ayah melalui cara pengajukan pengakuan anak dengan mengajukan permohonan asal usul anak ke pengadilan agama setelah mereka berdua menikah secara resmi di KUA.

ABSTRACT

Rahmania, Maulidia. 08210009. 2012. *Judges View on the Marital Status of Divorced Woman Outside Religious Court Proceedings (Case Studies in Religion Court Pasuruan)*. Al-Ahwal al-Syakhshiyyah Departement, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.
Supervisor: Erfaniah Zuhriah, M.H.

Keywords: Legal Status, Marriage, Divorce

Marriage is a sacred bond between husband and wife, marriage is considered valid if its conditions and pillars have been fulfilled. However if the marriage has been committed while the wife is a woman who has been divorced by her first husband but not through court proceedings then the law of is still dualism. However according to 39 of Law no. 1/1974 on Marriage and article 65 of Law no. 9/1989 on Religious Courts divorce can only be pronounced in front of the trial court after the relevant court trying and un successfully tried to reconcile the two sides.

The purpose of this research is to determine the method which is used by ijtihad judges in deciding cases of divorce the wife who had divorced her husband outside religious court, to describe the view of the judges on the legal status of marriage both divorced women outside the court and to determine the legal status of children of the second marriage of divorced women.

The research method used is field research (field research) with the help of a qualitative approach. Sources of data used are primary data sources such as interviews with informants (religious court judges Pasuruan) and secondary data form in the sources are legislation, books, journal of marriage and divorce. Data collecting techniques are interview, observation and documentation where as data processing techniques are editing, classifying, verifying, analyzing and concluding)

The results showed that methods of ijtihad which is used the by judges in deciding cases of wife who had divorced her husband outside religious court is Maslahah mursalah method. The legal status of the second is not legitimate due to the divorce of her first husband is outside of court, then the second marriage is also illegal (does not have legal power) and the status of the child with second husband, that there are two opinions (a) the children get a birth certificate from the civil office (b) children can come to the father's lineage through the recognition of the child by filing a petition asking the origin of the child to a religious court after they legally married in the religious affairs office.

ملخص البحث

رحمانية، مولدية. ٢٠١٢ ٩٠٠٠١٢٨٠. رأي القاضي على قانون الزواج أرملة مطلقة خارج المحكمة الدينية (دراسات المحكمة الدينية بسوروان). البحث الجامعى. الشعبة للأحوال الشخصية. قسم الشريعة. الجامعة الحكومية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف عرفانية زهرية، م.هـ.

الكلمة البحث: الوضع القانوني والزواج والطلاق

الزواج هو رباط مقدس بين الزوج والزوجة، ويمكن أن يكون الزواج صحيحاً إذا تم استيفاء شروط وأركان. لكن إذا تم تفريغه على الزواج بينما كانت الزوجة وهي امرأة وقد طلقها زوجها الأول ولكن ليس من خلال إجراءات المحكمة، ذلك قانون الزواج ليس لديها سيادة القانون لأن الوضع القانوني للطلاق مشروع أم لا. والدين هو الشريعة ولكن عند النظر المادة 39 من القانون رقم 1/1974 على الزواج والمادة 65 من القانون رقم 9/1989 على المحاكم الدينية، لا يمكن إلا أن يقال الطلاق أمام المحكمة بعد محاولة القضاء المختص وفشل في التوفيق بين الحاربين.

وكان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة استخدام طريقة قاضياً الاجتهاد في تحديد حالات الطلاق للزوجة الذي كان قد طلق زوجها خارج المحكمة الدينية، لوصف وجهة نظر قاضياً لحالة الزواج الثاني بعد الطلاق أرملة خارج المحكمة وفهم الوضع القانوني للطفل من الزواج الثاني من الطلاق الطلاق خارج المحكمة. طريقة البحث المستخدمة هي نوع من البحث الميداني مع مساعدة من نهج نوعي. مصادر البيانات الأولية المستخدمة هي مصادر البيانات مثل المقابلات مع المخبرين وهم قضاة المحاكم الدينية بسوروان، ومصادر البيانات الثانوية في شكل القوانين والكتب والمحلاطات التي تناقش الزواج والطلاق. تقنيات جمع البيانات عن طريق الملاحظة، وال مقابلة والوثائق و أما بالنسبة لمعالجة البيانات هو تحرير، تجميع البيانات، وتأكيد، وتحليل البيانات و الختامية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام طريقة الاجتهاد القاضي في تحديد حالات الطلاق من زوج طلق زوجته خارج المحكمة هو مصلحة المرسلة الأسلوب. الحالة القانونية من الزواج الثاني الشاكية وذكر القاضي أن زواجه لا يصح بسبب الطلاق زوجها الأول إنما زواجه خارج المحكمة وكان الطلاق لا يصح ثم الزواج الثاني هو أيضاً غير قانون (لا تكون لها قوة القانون) والأطفال من الشاكية من الزوج الثاني هناك رأيين (ا) نسب الأطفال تشارك في نسب الأمهات، ويمكن الحصول على شهادة ميلاد من الأهلية (ب) يستطيع الأطفال يأتون إلى نسب الأب من خلال الاعتراف للطفل عن طريق تقديم عريضة تطالب أصل الطفل إلى محكمة دينية بعد أن تزوج قانونياً في مكتب الشؤون الدينية.